BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Riau Pulp
Edisi : 9/Oktober/2007
Hari : Selasa
Halaman : 15

Riau Pulp Diusir DPR, Indah Kiat Diminta Tutup

Entah dimaksudkan sebagai langkah terobosan menjelang konferensi perubahan iklim di Bali awal Desember 2007, Komisi VII DPR yang membidangi lingkungan hidup, mulai unjuk gigi. Komisi ini sepertinya tidak ingin dibohongi dengan perusahaan industri kayu yang mengklaim dirinya ramah lingkungan.

Setidaknya itulah yang terjadi dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan direksi PT Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp) dan PT Indah Kiat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10) siang. Direksi Riaupulp bahkan diusir Komisi VII DPR dari ruang rapat, lantaran materi jawaban tertulis atas pertanyaan DPR yang diharapkan bisa disampaikan tiga hari sebelum rapat, ternyata baru dibagikan perusahaan ini sesaat sebelum rapat Senin itu.

RDPU Komisi VII Senin siang memang memanggil dua perusahaan terkait kerusakan lingkungan dari pembalakan liar di Riau. Agenda RDPU siang itu, dua perusahaan pulp dan kertas, Riaupulp dan PT Indah Kiat, atas undangan Komisi VII diminta untuk menjelaskan lahan hutan tanaman industri yang mereka kelola sebagai tempat menanam tanaman bahan baku pulp.

Penjelasan ini diperlukan komisi yang juga membidangi masalah lingkungan itu untuk mengungkap kebenaran di balik perseteruan Menteri Kehutanan MS Kaban dan aparat Polri seputar kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di provinsi tersebut. PT Riaupulp sendiri sebenarnya sudah memenuhi undangan minggu lalu, namun masih harus hadir dalam RDPU kali ini, terkait dengan pertanyaan sejumlah anggota DPR dan jawaban tertulis itu sudah harus masuk ke sekterariat Komisi VII DPR tiga hari sebelumnya.

RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi VII, Sony Keraf dan Riaupulp mendapat kesempatan pertama memberi penjelasan. Direktur Utamanya, Rudi Fajar yang memberikan penjelasan dalam RDPU ini, didampingi 18 manajer perusahaan tersebut.

Tetapi pemaparan kerap terhenti lantaran interupsi anggota Komisi VII seperti Ade Nasution dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Effendy Simbolon dan Royani Aminullah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI-P). Interupsi yang dilontarkan berupa pertanyaan tentang kantor Riaupulp di Jakarta yang satu gedung dengan Raja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto, figur Rudi Fajar yang baru mereka kenal berikut kekecewaan anggota DPR soal keterlambatan pembagian berkas penjelasan.

Ketika penjelasan tentang lahan yang dikelola dan asal sumber bahan baku, para anggota komisi itu merasa tidak puas. Kendati Rudi telah meminta agar salah satu manajer membantu menjelaskan berdasarkan peta, anggota DPR tetap tidak menerima.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Anggota Komisi VII tetap kesal atas keterlambatan penyerahan berkas penjelasan, kendati Rudi sudah menjelaskan alasannya. Atas permintaan anggota, Ketua Komisi VII menghentikan penjelasan dari Riaupulp, menyatakan akan menjadwal ulang agenda penjelasan dari perusahaan itu, lalu mengusir seluruh jajaran pimpinan PT tersebut dari ruang sidang.

Rapat berlanjut dengan meminta keterangan PT Indah Kiat. Wakil Presiden Komisaris PT itu, G Sulistiyanto, memerintahkan salah satu manajernya untuk langsung menjelaskan lahan yang dikelola dan sumber bahan baku pulp. Penjelasan disampaikan berdasar hasil rekaman foto satelit yang didapat dari salah satu situs di internet.

Diminta Tutup

Sejumlah anggota komisi kembali melontarkan tidak bisa langsung mengerti makna gambar yang dipresentasikan, dan meminta perusahaan itu menjelaskan sejujurnya bagaimana mereka mendapatkan bahan baku bagi industri pulpnya. Sempat terlontar pernyataan bahwa industri itu layak ditutup karena perusahaan tersebut diduga memanfaatkan kayu tidak legal.

Hal ini didasarkan pada data yang disampaikan dalam penjelasan tertulis bahwa Indah Kiat baru bisa mencukupi bahan baku dari lahan yang dikelolanya pada tahun 2009. Hal ini diartikan bahwa kekurangan bahan baku, saat ini, diperoleh dari pembalakan liar.

Sulistiyanto pun langsung interupsi. Dia membantah penafsiran seperti itu.

Kehadiran PT itu memenuhi undangan Komisi VII juga diharapkan bisa memberikan perlindungan atas tuduhan polisi yang dinilainya tidak berdasar bahwa perusahaan tersebut terlibat pembalakan liar. Dia pun langsung menawarkan anggota komisi meninjau langsung ke lokasi industrinya di Riau dan rapat yang berakhir sekitar pukul 16.00 WIB itu menyepakati mengagendakan kembali pertemuan dengan Riaupulp, dan merencanakan peninjauan ke industri Indah Kiat. [W-5]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup